



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.426, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Fiskal Daerah.
Peta Kapasitas.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 174/PMK.07/2009
TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadann Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing Daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.
6. Peta Kapasitas Fiskal Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Kapasitas Fiskal, adalah pengelompokan Daerah berdasarkan indeks kapasitas fiskal menjadi empat kelompok yaitu Daerah berkapasitas fiskal sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah.
7. Pinjaman Luar Negeri adalah salah satu unsur pembiayaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan/atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peta Kapasitas Fiskal digunakan untuk penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah dan/atau diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peta Kapasitas Fiskal terdiri dari Peta Kapasitas Fiskal provinsi, Peta Kapasitas Fiskal kabupaten/kota, dan Peta Kapasitas Fiskal daerah pemekaran.

BAB III PENYUSUNAN PETA KAPASITAS FISKAL

Pasal 3

Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:

- a. Penghitungan Kapasitas Fiskal provinsi dan kabupaten/kota; dan
- b. Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal provinsi dan kabupaten/Kota.

BAB IV PENGHITUNGAN KAPASITAS FISKAL DAN INDEKS KAPASITAS FISKAL

Pasal 4

- (1) Penghitungan Kapasitas Fiskal provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$KF = \frac{(PAD + DBB + DAU + LP) - BP}{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}$$

KF = Kapasitas Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH = Dana Bagi Hasil

DAU = Dana Alokasi Umum

LP = Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

BP = Belanja Pegawai

- (2) Jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penduduk miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun terakhir.
- (3) Penghitungan Kapasitas Fiskal didasarkan pada data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2008.
- (4) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-masing

provinsi dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh provinsi.

- (5) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-masing kabupaten/kota dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh kabupaten/kota.
- (6) Berdasarkan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Daerah dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:
 - a. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya lebih dari atau sama dengan 2 ($\text{indeks} \geq 2$) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal sangat tinggi;
 - b. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari 2 ($1 \leq \text{indeks} < 2$) merupakan Daerah yang termasuk Kategori Kapasitas Fiskal tinggi;
 - c. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari 0,5 sampai kurang dari 1 ($0,5 < \text{indeks} < 1$) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal sedang; dan
 - d. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya kurang dari atau sama dengan 0,5 ($\text{indeks} \leq 0,5$) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal rendah.

Pasal 5

- (1) Penetapan kategori Kapasitas Fiskal bagi daerah pemekaran yang belum memiliki APBD sendiri, mengikuti kategori Kapasitas Fiskal Daerah induk.
- (2) Daerah pemekaran tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. Kabupaten Padang Lawas Utara;
 2. Kabupaten Padang Lawas;
 3. Kabupaten Manggarai Timur;
 4. Kabupaten Kubu Raya;
 5. Kabupaten Tana Tidung;

6. Kabupaten Pesawaran;
 7. Kota Serang; dan
 8. Kota Tual.
- (3) Daerah pemekaran tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. Kabupaten Mamberamo Tengah;
 2. Kabupaten Yalimo;
 3. Kabupaten Lanny Jaya;
 4. Kabupaten Nduga;
 5. Kabupaten Puncak;
 6. Kabupaten Dogiyai;
 7. Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
 8. Kabupaten Labuhan Batu Utara;
 9. Kabupaten Bengkulu Tengah;
 10. Kota Sungai Penuh;
 11. Kabupaten Lombok Utara;
 12. Kabupaten Sigi;
 13. Kabupaten Toraja Utara;
 14. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 15. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 16. Kabupaten Maluku Barat Daya;
 17. Kabupaten Buru Selatan;
 18. Kabupaten Kepulauan Anambas;
 19. Kabupaten Nias Utara;
 20. Kabupaten Nias Barat;
 21. Kota Gunung Sitoli;
 22. Kabupaten Pringsewu;
 23. Kabupaten Mesuji;
 24. Kabupaten Tujang Bawang Barat;
 25. Kota Tangerang Selatan;

26. Kabupaten Sabu Raijua;
27. Kabupaten Pulau Morotai;
28. Kabupaten Intan Jaya;
29. Kabupaten Deiyai;
30. Kabupaten Tambrauw;
31. Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
32. Kabupaten Maybrat.

BAB V

PETA KAPASITAS FISKAL MASING-MASING DAERAH

Pasal 6

Peta Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Peta Kapasitas Fiskal provinsi adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;
- b. Peta Kapasitas Fiskal kabupaten/kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; dan
- c. Peta Kapasitas Fiskal daerah pemekaran adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2008 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2009
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 November 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 174/PMK.07/2009 TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

PETA KAPASITAS FISKAL PROVINSI

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
1	2	3	4
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	1,0053	Tinggi
2	Provinsi Sumatera Utara	0,5654	Sedang
3	Provinsi Sumatera Barat	0,9763	Sedang
4	Provinsi Riau	2,0529	Sangat Tinggi
5	Provinsi Jambi	1,3824	Tinggi
6	Provinsi Sumatera Selatan	0,5820	Sedang
7	Provinsi Bengkulu	0,5963	Sedang
8	Provinsi Lampung	0,2871	Rendah
9	Provinsi DKI Jakarta	7,9325	Sangat Tinggi
10	Provinsi Jawa Barat	0,4167	Rendah
11	Provinsi Jawa Tengah	0,2412	Rendah
12	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	0,5009	Sedang
13	Provinsi Jawa Timur	0,3093	Rendah
14	Provinsi Kalimantan Barat	0,7881	Sedang
15	Provinsi Kalimantan Tengah	1,7362	Tinggi
16	Provinsi Kalimantan Selatan	2,4487	Sangat Tinggi
17	Provinsi Kalimantan Timur	4,9662	Sangat Tinggi
18	Provinsi Sulawesi Utara	0,8967	Sedang
19	Provinsi Sulawesi Tengah	0,5015	Sedang
20	Provinsi Sulawesi Selatan	0,5504	Sedang
21	Provinsi Sulawesi Tenggara	0,5223	Sedang
22	Provinsi Bali	2,1158	Sangat Tinggi
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0,2237	Rendah

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
1	2	3	4
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,2974	Rendah
25	Provinsi Maluku	0,4493	Rendah
26	Provinsi Papua	0,5062	Sedang
27	Provinsi Maluku Utara	1,5052	Tinggi
28	Provinsi Banten	0,8514	Sedang
29	Provinsi Bangka Belitung	2,9668	Sangat Tinggi
30	Provinsi Gorontalo	0,6692	Sedang
31	Provinsi Kepulauan Riau	3,1331	Sangat Tinggi
32	Provinsi Papua Barat	1,1359	Tinggi
33	Provinsi Sulawesi Barat	0,7863	Sedang

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 174/PMK.07/2009 TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

PETA KAPASITAS FISKAL PROVINSI

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam		
1	Kabupaten Aceh Barat	0,4513	Rendah
2	Kabupaten Aceh Besar	0,3639	Rendah
3	Kabupaten Aceh Selatan	0,4508	Rendah
4	Kabupaten Aceh Singkil	0,5566	Sedang
5	Kabupaten Aceh Tengah	0,4056	Rendah
6	Kabupaten Aceh Tenggara	0,6329	Sedang
7	Kabupaten Aceh Timur	0,2881	Rendah
8	Kabupaten Aceh Utara	0,2025	Rendah
9	Kabupaten Bireuen	0,2431	Rendah
10	Kabupaten Pidie	0,1080	Rendah
11	Kabupaten simeuleu	0,8524	Sedang
12	Kota Banda Aceh	0,8626	Sedang
13	Kota Sabang	1,4702	Tinggi
14	Kota Langsa	0,5103	Sedang
15	Kota Lhokseumawe	0,7694	Sedang
16	Kabupaten Gayo Lues	1,3082	Tinggi
17	Kabupaten Aceh Barat Daya	0,5898	Sedang
18	Kabupaten Aceh Jaya	1,0068	Tinggi
19	Kabupaten Nagan Raya	0,5717	Sedang
20	Kabupaten Aceh Tamiang	0,9260	Sedang
21	Kabupaten Bener Meriah	0,4941	Rendah
22	Kota Subulussalam	0,5153	Sedang
23	Kabupaten Pidie Jaya	0,2557	Rendah

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
II	Provinsi Sumatera Utara		
24	Kabupaten Asahan	0,2723	Rendah
25	Kabupaten Dairi	0,6260	Sedang
26	Kabupaten Deli Serdang	0,5379	Sedang
27	Kabupaten Tanah Karo	0,4448	Rendah
28	Kabupaten Labuhan Batu	0,3499	Rendah
29	Kabupaten Langkat	0,2114	Rendah
30	Kabupaten Mandailing Natal	0,3974	Rendah
31	Kabupaten Nias	0,2357	Rendah
32	Kabupaten Simalungun	0,2185	Rendah
33	Kabupaten Tapanuli Selatan	0,3550	Rendah
34	Kabupaten Tapanuli Tengah	0,2801	Rendah
35	Kabupaten Tapanuli Utara	0,4897	Rendah
36	Kabupaten Toba Samosir	0,7095	Sedang
37	Kota Binjai	0,7573	Sedang
38	Kota Medan	0,3548	Rendah
39	Kota Pematang Siantar	0,4320	Rendah
40	Kota Sibolga	1,0508	Tinggi
41	Kota Tanjung Balai	0,6915	Sedang
42	Kota Tebing Tinggi	0,6972	Sedang
43	Kota Padang Sidempuan	0,5693	Sedang
44	Kabupaten Pakpak Barat	2,4801	Sangat Tinggi
45	Kabupaten Nias Selatan	0,3484	Rendah
46	Kabupaten Humbang Hasundutan	0,9688	Sedang
47	Kabupaten Serdang Bedagai	0,3396	Rendah
48	Kabupaten Samosir	0,6485	Sedang
49	Kabupaten Batu Bara	0,2200	Rendah
III	Provinsi Sumatera Barat		
50	Kabupaten Lima Puluh Kota	0,4526	Rendah
51	Kabupaten Agam	0,3433	Rendah
52	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2,0206	Sangat Tinggi
53	Kabupaten Padang Pariamam	0,3701	Rendah

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
54	Kabupaten Pasaman	0,4889	Rendah
55	Kabupaten Pesisir Selatan	0,4298	Rendah
56	Kabupaten Sawahlunti Sijunjung	0,9251	Sedang
57	Kabupaten Solok	0,4378	Rendah
58	Kabupaten Tanah Datar	0,6874	Sedang
59	Kota Bukit Tinggi	2,1451	Sangat Tinggi
60	Kota Padang Panjang	3,5598	Sangat Tinggi
61	Kota Padang	0,6100	Sedang
62	Kota Payakumbuh	1,2096	Tinggi
63	Kota Sawahlunto	11,3599	Sangat Tinggi
64	Kota Solok	3,9188	Sangat Tinggi
65	Kota Pariaman	5,2519	Sangat Tinggi
66	Kabupaten Pasaman Barat	0,6434	Sedang
67	Kabupaten Dharmasraya	0,8872	Sedang
68	Kabupaten Solok Selatan	1,1013	Tinggi
IV	Provinsi Riau		
69	Kabupaten Bengkalis	3,6035	Sangat Tinggi
70	Kabupaten Indragiri Hilir	0,7705	Sedang
71	Kabupaten Indragiri Hulu	1,4900	Tinggi
72	Kabupaten Kampar	1,2886	Tinggi
73	Kabupaten Kuantan Singingi	1,1925	Tinggi
74	Kabupaten Pelalawan	1,3787	Tinggi
75	Kabupaten Rokan Hilir	2,3081	Sangat Tinggi
76	Kabupaten Rokan Hulu	0,7375	Sedang
77	Kabupaten Siak	8,1446	Sangat Tinggi
78	Kota Dumai	2,4205	Sangat Tinggi
79	Kota Pekanbaru	1,7749	Tinggi
V	Provinsi Jambi		
80	Kabupaten Batanghari	1,1133	Tinggi
81	Kabupaten Bungo	1,9396	Tinggi
82	Kabupaten Kerinci	0,7412	Sedang
83	Kabupaten Merangin	0,9638	Sedang

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
84	Kabupaten Muaro Jambi	1,9282	Tinggi
85	Kabupaten Sarolangun	1,0072	Tinggi
86	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1,2642	Tinggi
87	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1,1988	Tinggi
88	Kabupaten Tebo	1,8286	Tinggi
89	Kota Jambi	0,4506	Rendah
VI	Provinsi Sumatera Selatan		
90	Kabupaten Lahat	0,3452	Rendah
91	Kabupaten Musi Banyuasin	0,8940	Sedang
92	Kabupaten Musi Rawas	0,6315	Sedang
93	Kabupaten Muara Enim	0,5266	Sedang
94	Kabupaten Ogan Komering Ilir	0,3975	Rendah
95	Kabupaten Ogan Komering Ulu	0,9444	Sedang
96	Kota Palembang	0,2135	Rendah
97	Kota Prabumulih	1,3540	Tinggi
98	Kota Pagar Alam	2,3052	Sangat Tinggi
99	Kota Lubuk Linggau	0,7847	Sedang
100	Kabupaten Banyuasin	0,4288	Rendah
101	Kabupaten Ogan Ilir	0,4358	Rendah
102	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	0,4420	Rendah
103	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	0,6618	Sedang
104	Kabupaten Empat Lawang	0,5180	Sedang
VII	Provinsi Bengkulu		
105	Kabupaten Bengkulu Selatan	0,3928	Rendah
106	Kabupaten Bengkulu Utara	0,4147	Rendah
107	Kabupaten Rejang Lebong	0,4138	Rendah
108	Kota Bengkulu	0,3785	Rendah
109	Kabupaten Kaur	0,5343	Sedang
110	Kabupaten Seluma	0,4109	Rendah
111	Kabupaten Mukomuko	0,8919	Sedang
112	Kabupaten Lebong	1,3575	Tinggi
113	Kabupaten Kepahiang	0,8856	Sedang

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
VIII	Provinsi Lampung		
114	Kabupaten Lampung Barat	0,3128	Rendah
115	Kabupaten Lampung Selatan	0,0989	Rendah
116	Kabupaten Lampung Tengah	0,1583	Rendah
117	Kabupaten Lampung Utara	0,1257	Rendah
118	Kabupaten Lampung Timur	0,1807	Rendah
119	Kabupaten Tanggamus	0,1367	Rendah
120	Kabupaten Tulang Bawang	0,4547	Rendah
121	Kabupaten Way Kanan	0,2871	Rendah
122	Kota Bandar Lampung	0,2213	Rendah
123	Kota Metro	0,6164	Sedang
IX	Provinsi DKI Jakarta		
X	Provinsi Jawa Barat		
124	Kabupaten Bandung	0,1835	Rendah
125	Kabupaten Bekasi	0,6827	Sedang
126	Kabupaten Bogor	0,2234	Rendah
127	Kabupaten Ciamis	0,1812	Rendah
128	Kabupaten Cianjur	0,1861	Rendah
129	Kabupaten Cirebon	0,0917	Rendah
130	Kabupaten Garut	0,1185	Rendah
131	Kabupaten Indramayu	0,1269	Rendah
132	Kabupaten Karawang	0,2436	Rendah
133	Kabupaten Kuningan	0,1097	Rendah
134	Kabupaten Majalengka	0,1038	Rendah
135	Kabupaten Purwakarta	0,1793	Rendah
136	Kabupaten Subang	0,1956	Rendah
137	Kabupaten Sukabumi	0,1628	Rendah
138	Kabupaten Sumedang	0,2086	Rendah
139	Kabupaten Tasikmalaya	0,1735	Rendah
140	Kota Bandung	0,8255	Sedang
141	Kota Bekasi	0,4199	Rendah
142	Kota Bogor	0,3753	Rendah

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
143	Kota Cirebon	0,5896	Sedang
144	Kota Depok	1,2092	Tinggi
145	Kota Sukabumi	0,5419	Sedang
146	Kota Tasikmalaya	0,1833	Rendah
147	Kota Cimahi	0,4174	Rendah
148	Kota Banjar	0,9227	Sedang
149	Kabupaten Bandung Barat	0,1499	Rendah
XI	Provinsi Jawa Tengah		
150	Kabupaten Banjarnegara	0,1129	Rendah
151	Kabupaten Banyumas	0,1084	Rendah
152	Kabupaten Batang	0,1578	Rendah
153	Kabupaten Blora	0,1683	Rendah
154	Kabupaten Boyolali	0,1799	Rendah
155	Kabupaten Brebes	0,0954	Rendah
156	Kabupaten Cilacap	0,1268	Rendah
157	Kabupaten Demak	0,1229	Rendah
158	Kabupaten Grobogan	0,1214	Rendah
159	Kabupaten Jepara	0,2893	Rendah
160	Kabupaten Karanganyar	0,1645	Rendah
161	Kabupaten Kebumen	0,0910	Rendah
162	Kabupaten Kendal	0,2018	Rendah
163	Kabupaten Klaten	0,1083	Rendah
164	Kabupaten Kudus	0,3655	Rendah
165	Kabupaten Magelang	0,1635	Rendah
166	Kabupaten Pati	0,1525	Rendah
167	Kabupaten Pekalongan	0,1744	Rendah
168	Kabupaten Pemalang	0,0904	Rendah
169	Kabupaten Purbalingga	0,1205	Rendah
170	Kabupaten Puworejo	0,1633	Rendah
171	Kabupaten Rembang	0,1387	Rendah
172	Kabupaten Semarang	0,2293	Rendah
173	Kabupaten Sragen	0,1265	Rendah

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
174	Kabupaten Sukoharjo	0,2083	Rendah
175	Kabupaten Tegal	0,1353	Rendah
176	Kabupaten Temanggung	0,1806	Rendah
177	Kabupaten Wonogiri	0,1411	Rendah
178	Kabupaten wonosobo	0,1087	Rendah
179	Kota Magelang	1,0151	Tinggi
180	Kota Pekalongan	0,7461	Sedang
181	Kota Salatiga	1,0128	Tinggi
182	Kota Semarang	0,8440	Sedang
183	Kota Surakarta	0,3526	Rendah
184	Kota Tegal	0,6513	Sedang
XII	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		
185	Kabupaten Bantul	0,3169	Rendah
186	Kabupaten Gunung Kidul	0,1256	Rendah
187	Kabupaten Kulon Progo	0,1644	Rendah
188	Kabupaten Sleman	0,2780	Rendah
189	Kota Yogyakarta	0,5430	Sedang
XIII	Provinsi Jawa Timur		
190	Kabupaten Bangkalan	0,1107	Rendah
191	Kabupaten Banyuwangi	0,3233	Rendah
192	Kabupaten Blitar	0,2172	Rendah
193	Kabupaten Bojonegoro	0,1741	Rendah
194	Kabupaten Bondowoso	0,1271	Rendah
195	Kabupaten Gresik	0,1901	Rendah
196	Kabupaten Jember	0,1451	Rendah
197	Kabupaten Jombang	0,1826	Rendah
198	Kabupaten Kediri	0,1511	Rendah
199	Kabupaten Lamongan	0,1566	Rendah
200	Kabupaten Lumajang	0,1884	Rendah
201	Kabupaten Madiun	0,1801	Rendah
202	Kabupaten Magetan	0,2243	Rendah
203	Kabupaten Malang	0,1769	Rendah

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
204	Kabupaten Mojokerto	0,1830	Rendah
205	Kabupaten Nganjuk	0,1366	Rendah
206	Kabupaten Ngawi	0,1550	Rendah
207	Kabupaten Pacitan	0,1724	Rendah
208	Kabupaten Pamekasan	0,1263	Rendah
209	Kabupaten Pasuruan	0,1672	Rendah
210	Kabupaten Ponorogo	0,1859	Rendah
211	Kabupaten Probolinggo	0,0638	Rendah
212	Kabupaten Sampang	0,1061	Rendah
213	Kabupaten Sidoarjo	0,4555	Rendah
214	Kabupaten Situbondo	0,2245	Rendah
215	Kabupaten Sumenep	0,1235	Rendah
216	Kabupaten Trenggalek	0,1621	Rendah
217	Kabupaten Tuban	0,1620	Rendah
218	Kabupaten Tulungagung	0,2642	Rendah
219	Kota Blitar	1,2087	Tinggi
220	Kota Kediri	1,2067	Tinggi
221	Kota Madiun	1,1874	Tinggi
222	Kota malang	0,6144	Sedang
223	Kota Mojokerto	2,0242	Sangat Tinggi
224	Kota Pasuruan	0,8823	Sedang
225	Kota Probolinggo	0,3796	Rendah
226	Kota Surabaya	0,7265	Sedang
227	Kota Batu	1,5382	Tinggi
XIV	Provinsi Kalimantan Barat		
228	Kabupaten Bengkayang	1,2168	Tinggi
229	Kabupaten Landak	0,4017	Rendah
230	Kabupaten Kapuas Hulu	1,8402	Tinggi
231	Kabupaten Ketapang	0,7217	Sedang
232	Kabupaten Pontianak	0,4593	Rendah
233	Kabupaten Sambas	0,4235	Rendah
234	Kabupaten Sanggau	1,1341	Tinggi

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
235	Kabupaten Sintang	0,9280	Sedang
236	Kota Pontianak	0,5380	Sedang
237	Kota Singkawang	1,2440	Tinggi
238	Kabupaten Sekadau	1,5530	Tinggi
239	Kabupaten Melawi	0,9571	Sedang
240	Kabupaten Kayong Utara	0,7068	Sedang
XV	Provinsi Kalimantan Tengah		
241	Kabupaten Barito Selatan	2,1352	Sangat Tinggi
242	Kabupaten Barito Utara	2,8844	Sangat Tinggi
243	Kabupaten Kapuas	1,0152	Tinggi
244	Kabupaten Kotawaringin Barat	1,8674	Tinggi
245	Kabupaten Kotawaringin Timur	1,1204	Tinggi
246	Kota Palangkaraya	1,8213	Tinggi
247	Kabupaten Katingan	2,9443	Sangat Tinggi
248	Kabupaten Seruyan	3,5028	Sangat Tinggi
249	Kabupaten Sukamara	8,1104	Sangat Tinggi
250	Kabupaten lamandau	5,6664	Sangat Tinggi
251	Kabupaten Gunung Mas	3,2530	Sangat Tinggi
252	Kabupaten Pulang Pisau	2,5043	Sangat Tinggi
253	Kabupaten Murung Raya	5,9069	Sangat Tinggi
254	Kabupaten Barito Timur	2,5076	Sangat Tinggi
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan		
255	Kabupaten Banjar	1,8370	Tinggi
256	Kabupaten Barito Kuala	1,2052	Tinggi
257	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1,1030	Tinggi
258	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1,1072	Tinggi
259	Kabupaten Hulu Sungai Utara	1,1763	Tinggi
260	Kabupaten Kotabaru	2,5648	Sangat Tinggi
261	Kabupaten Tabalong	1,5262	Tinggi
262	Kabupaten Tanah Laut	1,7679	Tinggi
263	Kabupaten Tapin	2,8285	Sangat Tinggi
264	Kota Banjarbaru	1,6689	Tinggi

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
1	2	3	4
265	Kota Banjarmasin	0,9078	Sedang
266	Kabupaten Balangan	3,1892	Sangat Tinggi
267	Kabupaten Tanah Bumbu	2,4449	Sangat Tinggi
XVII	Provinsi Kalimantan Timur		
268	Kabupaten Berau	10,4416	Sangat Tinggi
269	Kabupaten Bulungan	5,1753	Sangat Tinggi
270	Kabupaten Kutai	7,4267	Sangat Tinggi
271	Kabupaten Kutai Barat	6,9771	Sangat Tinggi
272	Kabupaten Kutai Timur	6,5177	Sangat Tinggi
273	Kabupaten Malinau	9,8111	Sangat Tinggi
274	Kabupaten Nunukan	4,5025	Sangat Tinggi
275	Kabupaten Paser	4,4100	Sangat Tinggi
276	Kota Balikpapan	5,4032	Sangat Tinggi
277	Kota Bontang	8,2609	Sangat Tinggi
278	Kota Samarinda	2,4400	Sangat Tinggi
279	Kota Tarakan	4,7217	Sangat Tinggi
280	Kabupaten Penajam Paser Utara	5,1504	Sangat Tinggi
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara		
281	Kabupaten Bolaang Mongondow	0,3683	Rendah
282	Kabupaten Minahasa	0,6012	Sedang
283	Kabupaten Kepulauan Sangihe	0,5222	Sedang
284	Kota Bitung	0,8869	Sedang
285	Kota Manado	0,9654	Sedang
286	Kabupaten Kepulauan Talaud	1,6982	Tinggi
287	Kabupaten Minahasa Selatan	0,5147	Sedang
288	Kota Tomohon	2,1576	Sangat Tinggi
289	Kabupaten Minahasa Utara	1,0985	Tinggi
290	Kota Kotamobagu	0,3861	Rendah
291	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	0,8095	Sedang
292	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang B	0,8596	Sedang
293	Kabupaten Minahasa Tenggara	0,4368	Rendah

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah		
294	Kabupaten Banggai	0,4830	Rendah
295	Kabupaten Banggai Kepulauan	0,5557	Sedang
296	Kabupaten Buol	0,7566	Sedang
297	Kabupaten Toli-Toli	0,5365	Sedang
298	Kabupaten Donggala	0,3126	Rendah
299	Kabupaten Morowali	0,6826	Sedang
300	Kabupaten Poso	0,5126	Sedang
301	Kota Palu	0,5374	Sedang
302	Kabupaten Parigi Moutong	0,3257	Rendah
303	Kabupaten Tojo Una Una	0,4271	Rendah
XX	Provinsi Sulawesi Selatan		
304	Kabupaten Bantaeng	0,9688	Sedang
305	Kabupaten Barru	0,8249	Sedang
306	Kabupaten Bone	0,2585	Rendah
307	Kabupaten Bulukumba	0,4235	Rendah
308	Kabupaten Enrekang	0,4534	Rendah
309	Kabupaten Gowa	0,3107	Rendah
310	Kabupaten Jeneponto	0,2387	Rendah
311	Kabupaten Luwu	0,3262	Rendah
312	Kabupaten Luwu Utara	0,4162	Rendah
313	Kabupaten Maros	0,3265	Rendah
314	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	0,3212	Rendah
315	Kabupaten Pinrang	0,7219	Sedang
316	Kabupaten Kepulauan Selayar	0,9095	Sedang
317	Kabupaten Sidenreng Rappang	1,1209	Tinggi
318	Kabupaten Sinjai	0,6697	Sedang
319	Kabupaten Soppeng	0,6825	Sedang
320	Kabupaten Takalar	0,4778	Rendah
321	Kabupaten Tana Toraja	0,2412	Rendah
322	Kabupaten Wajo	0,6068	Sedang
323	Kota Pare-Pare	2,0527	Sangat Tinggi

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
1	2	3	4
324	Kota Makassar	0,6070	Sedang
325	Kota Palopo	0,7076	Sedang
326	Kabupaten Luwu Timur	1,333	Tinggi
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara		
327	Kabupaten Buton	0,2915	Rendah
328	Kabupaten Konawe	0,2072	Rendah
329	Kabupaten Kolaka	0,4087	Rendah
330	Kabupaten Muna	0,1897	Rendah
331	Kota Kendari	0,7616	Sedang
332	Kota Bau-Bau	0,8002	Sedang
333	Kabupaten Konawe Selatan	0,4737	Rendah
334	Kabupaten Bombana	0,8032	Sedang
335	Kabupaten Wakatobi	0,7840	Sedang
336	Kabupaten Kolaka Utara	0,9033	Sedang
337	Kabupaten Konawe Utara	1,3813	Tinggi
338	Kabupaten Buton Utara	0,6105	Sedang
XXII	Provinsi Bali		
339	Kabupaten Badung	6,6340	Sangat Tinggi
340	Kabupaten Bangli	0,9527	Sedang
341	Kabupaten Buleleng	0,4687	Rendah
342	Kabupaten Gianyar	0,6411	Sedang
343	Kabupaten Jembarana	0,9132	Sedang
344	Kabupaten Karangasem	0,4309	Rendah
345	Kabupaten Klungkung	1,2205	Tinggi
346	Kabupaten Tabanan	0,8054	Sedang
347	Kota Denpasar	2,5492	Sangat Tinggi
XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat		
348	Kabupaten Bima	0,2080	Rendah
349	Kabupaten Dompu	0,2441	Rendah
350	Kabupaten Lombok Barat	0,0986	Rendah
351	Kabupaten Lombok Tengah	0,0937	Rendah
352	Kabupaten Lombok Timur	0,0943	Rendah

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
353	Kabupaten Sumbawa	0,2165	Rendah
354	Kota Mataram	0,2549	Rendah
355	Kota Bima	0,5758	Sedang
356	Kabupaten Sumbawa Barat	0,8068	Sedang
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur		
357	Kabupaten Alor	0,4199	Rendah
358	Kabupaten Belu	0,2327	Rendah
359	Kabupaten Ende	0,3055	Rendah
360	Kabupaten Flores Timur	0,6641	Sedang
361	Kabupaten Kupang	0,2552	Rendah
362	Kabupaten Lembata	0,5679	Sedang
363	Kabupaten Manggarai	0,1525	Rendah
364	Kabupaten Ngada	0,4573	Rendah
365	Kabupaten Sikka	0,4142	Rendah
366	Kabupaten Sumba Barat	0,0297	Rendah
367	Kabupaten Sumba Timur	0,2899	Rendah
368	Kabupaten Timor Tengah Selatan	0,1314	Rendah
369	Kabupaten Timor Tengah Utara	0,3386	Rendah
370	Kota Kupang	0,3131	Rendah
371	Kabupaten Rote Ndao	0,4467	Rendah
372	Kabupaten Manggarai Barat	0,4312	Rendah
373	Kabupaten Nagakeo	0,6749	Sedang
374	Kabupaten Sumba Barat Daya	0,1523	Rendah
375	Kabupaten Sumba Tengah	0,4490	Rendah
XXV	Provinsi Maluku		
376	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	0,5445	Sedang
377	Kabupaten Maluku Tengah	0,3132	Rendah
378	Kabupaten Maluku Tenggara	0,4889	Rendah
379	Kabupaten Buru	0,6685	Sedang
380	Kota Ambon	0,8015	Sedang
381	Kabupaten Seram Bagian Barat	0,3549	Rendah
382	Kabupaten Seram Bagian Timur	0,9194	Sedang

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
383	Kabupaten Kepulauan Aru	0,7850	Sedang
XXVI	Provinsi Papua		
384	Kabupaten Biak Numfor	0,6122	Sedang
385	Kabupaten Jayapura	1,5792	Tinggi
386	Kabupaten Jayawijaya	0,2895	Rendah
387	Kabupaten Merauke	2,6886	Sangat Tinggi
388	Kabupaten Mimika	2,0112	Sangat Tinggi
389	Kabupaten Nabire	0,5965	Sedang
390	Kabupaten Paniai	0,8189	Sedang
391	Kabupaten Puncak Jaya	0,9190	Sedang
392	Kabupaten Yahukimo	0,6497	Sedang
393	Kota Jayapura	0,6713	Sedang
394	Kabupaten Mamberamo Raya	2,6597	Sangat Tinggi
395	Kabupaten Tolikara	1,2220	Tinggi
396	Kabupaten Keerom	2,8725	Sangat Tinggi
397	Kabupaten Pegunungan Bintang	0,8950	Sedang
398	Kabupaten Boven Digoel	5,4794	Sangat Tinggi
399	Kabupaten Mappi	2,1348	Sangat Tinggi
400	Kabupaten Asmat	1,7724	Tinggi
401	Kabupaten Waropen	2,4261	Sangat Tinggi
402	Kabupaten Sarmi	4,7068	Sangat Tinggi
403	Kabupaten Supiori	4,2176	Sangat Tinggi
404	Kabupaten Kepulauan Yapen	0,5943	Sedang
XXVII	Provinsi Maluku Utara		
405	Kabupaten Halmahera Tengah	2,2025	Sangat Tinggi
406	Kabupaten Halmahera Barat	1,1603	Tinggi
407	Kota Ternate	2,5453	Sangat Tinggi
408	Kabupaten Halmahera Timur	2,3032	Sangat Tinggi
409	Kabupaten Halmahera Selatan	1,3852	Tinggi
410	Kabupaten Halmahera Utara	1,7389	Tinggi
411	Kabupaten Kepulauan Sula	2,2387	Sangat Tinggi
412	Kota Tidore Kepulauan	3,3564	Sangat Tinggi

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
XXVIII	Provinsi Banten		
413	Kabupaten Lebak	0,2078	Rendah
414	Kabupaten Pandeglang	0,2029	Rendah
415	Kabupaten Serang	0,3414	Rendah
416	Kabupaten Tangerang	0,3609	Rendah
417	Kota Cilegon	2,2567	Sangat Tinggi
418	Kota Tangerang	0,4591	Rendah
XXIX	Provinsi Bangka Belitung		
419	Kabupaten Bangka	1,4096	Tinggi
420	Kabupaten Blitung	2,1230	Sangat Tinggi
421	Kota Pangkal Pinang	3,0803	Sangat Tinggi
422	Kabupaten Bangka Selatan	3,8269	Sangat Tinggi
423	Kabupaten Bangka Tengah	2,4090	Sangat Tinggi
424	Kabupaten Bangka Barat	4,3432	Sangat Tinggi
425	Kabupaten Belitung Timur	2,7872	Sangat Tinggi
XXX	Provinsi Gorontalo		
426	Kabupaten Boalemo	0,4787	Rendah
427	Kabupaten Gorontalo	0,1177	Rendah
428	Kota Gorontalo	1,7499	Tinggi
429	Kabupaten Pohuwato	0,6983	Sedang
430	Kabupaten Bone Bolango	0,7645	Sedang
431	Kabupaten Gorontalo Utara	0,5826	Sedang
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau		
432	Kabupaten Natuna	10,2702	Sangat Tinggi
433	Kabupaten Karimun	2,8816	Sangat Tinggi
434	Kota Batam	1,2737	Tinggi
435	Kota Tanjung Pinang	1,,8665	Tinggi
436	Kabupaten Lingga	1,4277	Tinggi
437	Kabupaten Bintan	2,8829	Sangat Tinggi
XXXII	Provinsi Papua Barat		
438	Kabupaten Sorong	1,3084	Tinggi
439	Kabupaten Manokwari	0,4245	Rendah

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
440	Kabupaten Fak-Fak	1,7187	Tinggi
441	Kota Sorong	1,5329	Tinggi
442	Kabupaten Raja Ampat	3,9290	Sangat Tinggi
443	Kabupaten Sorong Selatan	2,8744	Sangat Tinggi
444	Kabupaten Teluk Bintuni	2,2456	Sangat Tinggi
445	Kabupaten Teluk Wondama	2,3857	Sangat Tinggi
446	Kabupaten Kaimana	4,7101	Sangat Tinggi
XXXXIII	Provinsi Sulawesi Barat		
447	Kabupaten Majene	0,5807	Sedang
448	Kabupaten mamuju	0,9842	Sedang
449	Kabupaten Polewali Mandar	0,2026	Rendah
450	Kabupaten mamasa	0,7290	Sedang
451	Kabupaten Mamuju Utara	3,0314	Sangat Tinggi

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 174/PMK.07/2009 TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH PEMEKARAN

No	Daerah	Daerah Induk		
			Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Induk	Kategori
1	2	3	4	5
DAERAH PEMEKARAN 2007				
1	Kabupaten Padang Lawas Utara	Kabupaten Tapanuli Selatan	0,3550	Rendah
2	Kabupaten Padang Lawas	Kabupaten Tapanuli Selatan	0,3550	Rendah
3	Kabupaten Pesawaran	Kabupaten Lampung Selatan	0,0989	Rendah
4	Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Pontianak	0,4593	Rendah
5	Kabupaten Tana Tidung	Kabupaten Bulungan	5,1753	Sangat Tinggi
6	Kabupaten Manggarai Timur	Kabupaten Manggarai	0,1525	Rendah
7	Kota Tual	Kabupaten Maluku Tenggara	0,4889	Rendah
8	kota Serang	Kabupaten Serang	0,3414	Rendah
DAERAH PEMEKARAN 2008				
1	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Kabupaten Labuhan Batu	0,3499	Rendah
2	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Kabupaten Labuhan Batu	0,3499	Rendah
3	Kabupaten Nias Utara	Kabupaten Nias	0,2357	Rendah
4	Kabupaten Nias Barat	Kabupaten Nias	0,2357	Rendah
5	Kota Gunung Sitoli	Kabupaten Nias	0,2357	Rendah
6	Kabupaten Kepulauan Meranti	Kabupaten Bengkalis	3,6035	Sangat Tinggi
7	Kota Sungai Penuh	Kabupaten Kerinci	0,7412	Sedang
8	Kabupaten Bengkulu Tengah	Kabupaten Bengkulu Utara	0,4147	Rendah
9	Kabupaten Pringsewu	Kabupaten Tanggamus	0,1367	Rendah
10	Kabupaten Mesuji	Kabupaten Tulang Bawang	0,4547	Rendah
11	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Kabupaten Tulang Bawang	0,4547	Rendah
12	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Kabupaten Bolaang Mongondow	0,3683	Rendah
13	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Kabupaten Bolaang Mongondow	0,3683	Rendah
14	Kabupaten Sigi	Kabupaten Donggala	0,3126	Rendah
15	Kabupaten Toraja Utara	Kabupaten Tana Toraja	0,2412	Rendah
16	Kabupaten Lombok Utara	Kabupaten Lombok Barat	0,0986	Rendah

No	Daerah	Daerah Induk		
			Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Induk	Kategori
1	2	3	4	5
17	Kabupaten Sabu Raijua	Kabupaten Kupang	0,2552	Rendah
18	Kabupaten Maluku Barat Daya	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	0,5445	Sedang
19	Kabupaten Buru Selatan	Kabupaten Buru	0,6685	Sedang
20	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kabupaten Jayawijaya	0,2895	Rendah
21	Kabupaten Yalimo	Kabupaten Jayawijaya	0,2895	Rendah
22	Kabupaten Lanny Jaya	Kabupaten Jayawijaya	0,2895	Rendah
23	Kabupaten Nduga	Kabupaten Jayawijaya	02895	Rendah
24	Kabupaten Puncak	Kabupaten Puncak Jaya	0,9190	Sedang
25	Kabupaten Dogiyai	Kabupaten Nabire	0,5965	Sedang
26	Kabupaten Intan Jaya	Kabupaten Paniai	0,8189	Sedang
27	Kabupaten Deiyai	Kabupaten Paniai	0,8189	Sedang
28	Kabupaten Pulau Morotai	Kabupaten Halmahera Utara	1,7389	Tinggi
29	Kota Tangerang Selatan	Kabupaten Tangerang	0,3609	Rendah
30	Kabupaten Kepulauan Anambas	Kabupaten Natuna	10,2702	Sangat Tinggi
31	Kabupaten Tambrau	Kabupaten Sorong	1,3084	Tinggi
32	Kabupaten Maybrat	Kabupaten Sorong	1,3084	Tinggi

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI